

Peran Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu Dan Anak di Desa

Fadila Nusu

Universitas Bina Taruna Gorontalo
fadila123nusu@gmail.com

Ellys Rachman

Universitas Bina Taruna Gorontalo
ellysrachman12@gmail.com

Jusrin Kadir

Universitas Bina Taruna Gorontalo
kadirjus04@gmail.com

Received: 26-06-2025

Revised: 21-08-2025

Accepted: 20-10-2025

Abstract

Maternal and child health are key indicators of public health development. Posyandu (integrated health service posts) serve as community-based efforts that bring basic health services closer to the community, especially in rural areas. However, the effectiveness of Posyandu is still hindered by low community participation, limited facilities, and inadequate coordination among village actors. This study was conducted in Malambe Village, Ponelo Kepulauan Sub-district, Gorontalo Utara District, to analyze the role of Posyandu cadres in improving maternal and child health. The method employed was qualitative, utilizing a case study approach. The research informants consisted of seven individuals, including village officials, the KPM chairperson, Posyandu cadres, and community members. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation, then analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The results of the study indicate that Posyandu cadres play a role in three aspects: health socialization, coordination with the village government and health centers, and motivating the community to participate actively in Posyandu activities. The main obstacles include a lack of facilities, low community awareness, and the absence of a Posyandu building. This study emphasizes the need to strengthen the capacity of cadres, provide facility support, and foster cross-sectoral collaboration to ensure that Posyandu effectively supports maternal and child health.

Keywords: *Socialization, Coordination, Motivation*

Abstrak

Kesehatan ibu dan anak merupakan indikator utama pembangunan kesehatan masyarakat. Posyandu hadir sebagai upaya berbasis masyarakat yang berfungsi mendekatkan layanan kesehatan dasar, khususnya di wilayah pedesaan. Namun, efektivitas Posyandu masih terkendala partisipasi masyarakat yang rendah, keterbatasan fasilitas, serta lemahnya koordinasi antar-aktor desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Malambe, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan tujuan menganalisis peran kader

Posyandu dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan penelitian terdiri dari tujuh orang, meliputi pemerintah desa, ketua KPM, kader Posyandu, dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kader Posyandu berperan melalui tiga aspek: sosialisasi kesehatan, koordinasi dengan pemerintah desa dan Puskesmas, serta motivasi masyarakat agar aktif mengikuti kegiatan Posyandu. Hambatan utama mencakup minimnya sarana, rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum adanya gedung Posyandu. Penelitian ini menekankan perlunya penguatan kapasitas kader, dukungan fasilitas, dan kolaborasi lintas sektor agar Posyandu optimal mendukung kesehatan ibu dan anak.

Kata Kunci: Sosialisasi, Koordinasi, motivasi

PENDAHULUAN

Kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan kesehatan berkelanjutan, sekaligus indikator penting keberhasilan sistem kesehatan nasional. Komitmen global melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya target 3.1 dan 3.2, menekankan pentingnya menurunkan angka kematian ibu hingga di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup dan mengakhiri kematian bayi serta balita yang dapat dicegah. Meski terdapat kemajuan, tantangan masih besar: laporan *World Health Organization*¹ mencatat bahwa setiap hari lebih dari 800 perempuan meninggal akibat komplikasi kehamilan, dan sekitar 5 juta anak meninggal sebelum usia lima tahun, mayoritas di negara berkembang.

Indonesia pun masih menghadapi persoalan serius. Angka Kematian Ibu (AKI) tercatat sebesar 189 per 100.000 kelahiran hidup (BPS, 2022)², sementara prevalensi stunting balita masih 21,6% (Kemenkes RI, 2023)³. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses dan kualitas layanan kesehatan dasar, khususnya bagi kelompok rentan seperti ibu hamil dan balita, perlu diperkuat. Sejak awal 1980-an pemerintah telah menghadirkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang mengedepankan partisipasi masyarakat melalui kader kesehatan lokal. Posyandu berfungsi sebagai ujung tombak pelayanan promotif dan preventif yang menyatu dengan kehidupan sosial masyarakat desa.⁴

¹ WHO, "Maternal mortality," 2024, https://www-who-int.translate.google/news-room/factsheets/detail/maternal-mortality?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.

² "Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia," Kemenkes, 2023., diakses 20 Agustus 2025, https://ppid.kemkes.go.id/toapsoot/2024/10/FINAL_LAKIP-KEMENKES-2023_compressed.pdf.

³ "Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia."

⁴ Icol Dianto dkk., "Netizens' Communication Ethics on Instagram in Islamic Perspective," *Communicator: Journal of Communication* 2, no. 1 (2025): 1, <https://doi.org/10.59373/comm.v2i1.98>.

Berbagai studi menunjukkan bahwa keberadaan kader Posyandu sangat berpengaruh pada pemantauan pertumbuhan balita, edukasi gizi, serta kesehatan ibu hamil⁵. Dalam perspektif internasional, peran kader kesehatan di tingkat komunitas yang sejajar dengan *Community Health Workers* (CHWs) telah terbukti efektif meningkatkan cakupan imunisasi⁶, memperbaiki status gizi⁷, dan menurunkan angka kematian ibu-anak⁸, dengan catatan bahwa keberhasilan program bergantung pada pelatihan, insentif, dan dukungan kelembagaan⁹. Namun, efektivitas Posyandu di Indonesia tidak seragam. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa masih banyak hambatan berupa rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sarana, serta lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa¹⁰. Kondisi tersebut juga nyata di Desa Malambe, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, yang memiliki tiga dusun dengan lima kader aktif di masing-masing dusun serta seorang Ketua KPM sebagai koordinator. Meski keberadaan kader sudah berjalan sejak Posyandu berdiri pada 2011, hingga kini kegiatan masih dilaksanakan di rumah kader karena gedung khusus belum tersedia. Hambatan lain adalah rendahnya sosialisasi, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya layanan Posyandu, belum konsistennya penyediaan makanan bergizi, serta lemahnya koordinasi antara kader dan pemerintah desa terutama terkait transparansi penggunaan dana desa untuk mendukung fasilitas Posyandu.

Dalam konteks regulasi, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP No.28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksanaannya. Kehadiran regulasi ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat sistem kesehatan nasional melalui pendekatan promotif-preventif, pemerataan distribusi tenaga kesehatan, dan perlindungan hukum bagi penyedia layanan. Meski demikian, implementasi kebijakan tersebut di tingkat desa sangat bergantung pada peran kader Posyandu dan dukungan pemerintah desa, sehingga penelitian mengenai dinamika peran kader di wilayah terpencil menjadi semakin relevan. Dari sisi akademis, terdapat gap penelitian yang penting. *Pertama*, sebagian besar penelitian mengenai Posyandu dilakukan di wilayah perkotaan atau daratan besar seperti Jawa,

⁵ Wahyu Ersila dan S ST, "Peran kader dalam mengoptimalkan keamanan pangan pada ibu hamil," *Tantangan Dan Problematika Ilmu Kesehatan Masyarakat* 27 (2024).

⁶ Ersila dan ST, "Peran kader dalam mengoptimalkan keamanan pangan pada ibu hamil."

⁷ Nisa Nugraheni dan Abdul Malik, "Peran kader posyandu dalam mencegah kasus stunting di Kelurahan Ngijo," *Lifelong Education Journal* 3, no. 1 (2023): 83–92, <https://doi.org/10.59935/lej.v3i1.198>.

⁸ M Kholis Hamdy dkk., "Peran kader posyandu dalam menurunkan angka stunting," *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia* 4, no. 2 (2023): 87–96, <https://doi.org/10.15408/jisi.v4i2.37128>.

⁹ Hamdy dkk., "Peran kader posyandu dalam menurunkan angka stunting."

¹⁰ Nani Sintiawati dkk., "Partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan posyandu," *Lifelong Education Journal* 1, no. 1 (2021): 91–95, <https://doi.org/10.59935/lej.v1i1.2>.

sementara riset di daerah kepulauan terpencil seperti Gorontalo Utara masih minim. *Kedua*, studi terdahulu cenderung menekankan aspek teknis kader (pencatatan, pemantauan tumbuh kembang), tetapi kurang menyoroti faktor sosial-budaya yang memengaruhi partisipasi masyarakat. *Ketiga*, keterkaitan antara peran kader, dukungan kelembagaan desa, dan pengelolaan dana desa untuk kesehatan belum banyak dianalisis secara mendalam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada pertanyaan: bagaimana peran kader Posyandu dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak di Desa Malambe, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan mempertimbangkan keterbatasan infrastruktur, partisipasi masyarakat, dan koordinasi kelembagaan desa? Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dengan memperkaya literatur tentang community health workers di konteks kepulauan serta kontribusi praktis berupa rekomendasi bagi penguatan kebijakan kesehatan berbasis masyarakat di daerah terpencil.

METHOD

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Malambe, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara dengan pertimbangan bahwa hingga saat ini belum terdapat penelitian serupa yang secara khusus mengkaji peran kader Posyandu di wilayah tersebut. Pemilihan lokasi juga didasarkan pada pertimbangan praktis karena letaknya mudah dijangkau, sehingga efisien dari segi waktu, tenaga, dan biaya penelitian. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis bersifat induktif, serta hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi¹¹.

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria relevansi dengan fokus penelitian. Jumlah informan sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari: Pemerintah Desa 1 orang, Ketua KPM Posyandu 1 orang, kader Posyandu 3 orang, serta masyarakat 2 orang yang meliputi ibu hamil dan orang tua balita sebagai pengguna layanan Posyandu. Komposisi ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran kader Posyandu dari sudut pandang pengambil kebijakan, pelaksana, maupun penerima layanan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan. *Pertama*, reduksi data, yaitu

¹¹ Dr Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Alfabeta, 2013.

proses pemilihan dan penyederhanaan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. *Kedua*, penyajian data, yaitu pengorganisasian data ke dalam uraian naratif untuk mempermudah peneliti melihat pola hubungan antar temuan¹². *Ketiga*, penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses interpretasi makna data secara berulang, sekaligus memastikan validitasnya melalui perbandingan antar sumber informasi¹³. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan yang diberikan oleh pemerintah desa, Ketua KPM, kader Posyandu, dan masyarakat, sementara triangulasi metode ditempuh melalui kombinasi wawancara mendalam, observasi langsung, dan telaah dokumen seperti laporan Posyandu dan kerangka teori yang digunakan.

RESULTS AND DISCUSSION

Hasil Penelitian

Hasil penelitian lapangan mengenai peran kader Posyandu di Desa Malambe menunjukkan adanya dinamika yang cukup kompleks dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Secara umum, kader Posyandu berperan aktif dalam memberikan layanan dasar kesehatan, khususnya bagi ibu hamil, balita, dan lansia. Namun demikian, implementasi kegiatan di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari sisi partisipasi masyarakat, ketersediaan fasilitas, maupun dukungan pemerintah desa. Dari hasil wawancara mendalam dengan para informan, ditemukan bahwa peran kader Posyandu dapat dipahami melalui tiga fokus utama. *Pertama*, sosialisasi, yakni bagaimana kader melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya kesehatan ibu dan anak. *Kedua*, koordinasi, yaitu upaya kader dalam menjalin komunikasi dan kerja sama dengan pemerintah desa maupun antar-kader dalam mengatasi hambatan di lapangan. *Ketiga*, motivasi, yang mencerminkan dorongan kader maupun masyarakat untuk tetap aktif mengikuti kegiatan Posyandu meskipun berbagai keterbatasan masih dirasakan. Temuan-temuan dalam penelitian ini memperlihatkan adanya keselarasan maupun perbedaan pandangan antar-informan. Beberapa pengalaman yang diungkapkan menunjukkan praktik yang berjalan baik dan konsisten, namun sebagian lainnya menyoroti kendala yang masih menghambat optimalisasi peran kader. Oleh karena itu, hasil

¹² Muhammad Naeem dkk., "A step-by-step process of thematic analysis to develop a conceptual model in qualitative research," *International journal of qualitative methods* 22 (2023): 16094069231205789, <https://doi.org/10.1177/16094069231205789>.

¹³ Matthew B Miles dan A Michael Huberman, *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (sage, 1994).

penelitian berikut akan diuraikan secara lebih rinci berdasarkan tiga fokus utama tersebut, disertai kutipan wawancara yang merepresentasikan kondisi nyata di lapangan.

Sosialisasi

Peran kader Posyandu dalam sosialisasi di Desa Malambe menunjukkan masih adanya keterbatasan dalam menjangkau seluruh masyarakat. Seorang kader menekankan bahwa sebagian besar warga hanya memandang Posyandu sebatas tempat penimbangan balita:

“Kami selalu berusaha mengajak masyarakat, terutama ibu-ibu, untuk datang ke Posyandu. Tetapi masih banyak yang menganggap kegiatan ini hanya sebatas penimbangan anak. Padahal di Posyandu juga ada penyuluhan gizi, imunisasi, dan pemeriksaan ibu hamil.” (Wawancara, K3, 12 Juni 2024).

Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat masyarakat yang juga mengakui bahwa sebagian warga belum memahami fungsi menyeluruh Posyandu:

“Saya datang ke Posyandu karena ingin anak sehat. Tapi masih ada ibu-ibu lain yang bilang tidak sempat atau merasa tidak perlu. Kalau ada penyuluhan langsung di dusun, mungkin mereka lebih sadar.” (Wawancara, M1, 14 Juni 2024).

Namun, Ketua KPM justru menekankan pada aspek metode sosialisasi yang masih bersifat pasif:

“Sosialisasi kadang hanya dilakukan saat kegiatan berlangsung. Padahal menurut saya, perlu ada pendekatan lebih ke rumah-rumah supaya warga lebih paham pentingnya layanan Posyandu.” (Wawancara, K2, 13 Juni 2024).

Analisis menunjukkan bahwa ketiga kutipan tersebut saling melengkapi: kader menyoroti kurangnya pemahaman masyarakat, warga mengakui masih ada yang abai, dan Ketua KPM melihat perlunya inovasi metode sosialisasi. Artinya, fokus sosialisasi sudah berjalan tetapi belum optimal karena metode yang digunakan masih pasif.

Koordinasi

Koordinasi kader dengan pemerintah desa masih belum maksimal, baik dari segi intensitas maupun tindak lanjutnya. Ketua KPM menegaskan bahwa rapat koordinasi belum cukup rutin:

“Koordinasi dengan pemerintah desa memang ada, tapi sering kali masih sebatas rapat tahunan. Harusnya ada evaluasi rutin agar kendala seperti keterbatasan alat kesehatan dan tempat kegiatan bisa segera diatasi.” (Wawancara, K2, 13 Juni 2024).

Pernyataan ini sejalan dengan pandangan kader yang juga merasa komunikasi dengan pemerintah desa masih kurang intens:

“Kami butuh koordinasi yang lebih sering, bukan hanya menunggu rapat desa. Karena kadang masalah muncul di lapangan dan butuh solusi cepat.” (Wawancara, K1, 16 Juni 2024).

Namun, dari sisi pemerintah desa, koordinasi dipandang sudah cukup meskipun masih terkendala dana:

“Pemerintah desa sebenarnya ingin membangun gedung Posyandu permanen, tetapi keterbatasan dana membuat rencana itu belum terealisasi. Meski begitu, kami tetap mendukung kegiatan kader dengan insentif bulanan.” (Wawancara, P1, 15 Juni 2024).

Analisis dari ketiga kutipan menunjukkan adanya gap persepsi: kader dan Ketua KPM menganggap koordinasi masih minim, sedangkan pemerintah desa menekankan aspek dukungan meski terbatas anggaran. Realitas ini menunjukkan bahwa koordinasi belum berjalan efektif karena tidak ada kesepahaman dalam memaknai koordinasi antara kedua belah pihak.

Motivasi

Motivasi kader Posyandu tetap terjaga meski insentif relatif kecil. Seorang kader menegaskan bahwa motivasi utamanya adalah kepedulian sosial:

“Kalau hanya melihat dari insentif, sebenarnya tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Tapi karena kami merasa ini adalah tanggung jawab moral untuk membantu masyarakat, maka kami tetap berkomitmen.” (Wawancara, K1, 16 Juni 2024).

Sejalan dengan pandangan masyarakat, yang mengakui peran aktif kader dalam menjaga partisipasi warga:

“Menurut saya kader di sini cukup rajin, mereka selalu mengingatkan kalau ada kegiatan. Tapi ada juga warga yang malas datang. Kalau kader tidak terus semangat, mungkin kegiatan Posyandu akan sepi.” (Wawancara, M2, 17 Juni 2024).

Namun, Ketua KPM menyoroti potensi penurunan motivasi jika penghargaan terhadap kader tidak ditingkatkan:

“Kadang kader merasa lelah karena kerja banyak tapi apresiasi sedikit. Kalau motivasi tidak dijaga, bisa jadi ke depan mereka kurang aktif.” (Wawancara, K2, 13 Juni 2024).

Dari ketiga kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi kader saat ini cukup kuat karena faktor kepedulian sosial dan dorongan masyarakat, namun berpotensi menurun bila apresiasi dari pemerintah tidak ditingkatkan.

Pembahasan

Analisis Temuan dan Teori

Tabel 1. Analisis Temuan Lapangan

Fokus Penelitian	Coding Data	Kutipan Wawancara	Analisis Temuan	Analisis Teori
Sosialisasi	Rendahnya pemahaman masyarakat tentang fungsi posyandu;	1) “Kami sudah sering mengingatkan masyarakat, tapi yang datang hanya itu-itu saja, kadang mereka bilang sibuk.” (Kader A) 2)	Sosialisasi belum optimal; masyarakat lebih mengenal posyandu sebatas	Menurut Notoatmodjo efektivitas komunikasi kesehatan bergantung

	keterbatasan kader dalam menyampaikan informasi.	“Saya tahu posyandu itu hanya untuk timbang anak, padahal saya baru tahu kalau ada penyuluhan gizi juga.” (Ibu Balita) 3) “Kader datang kasih tahu kalau ada posyandu, tapi banyak warga lebih memilih kerja di kebun daripada datang.” (Masyarakat)	penimbangan balita, belum melihat manfaat menyeluruh.	pada persepsi penerima pesan ¹⁴ . Sejalan dengan Rogers, difusi inovasi memerlukan pemahaman manfaat dan kemudahan akses ¹⁵ .
Koordinasi	Rapat evaluasi rutin, namun keterlibatan pemerintah desa masih minim; belum ada gedung posyandu.	1) “Kami ada rapat tiap bulan, tapi soal anggaran masih jarang dibicarakan secara jelas.” (Ketua KPM) 2) “Pemerintah desa biasanya hanya datang kalau ada kegiatan besar, kalau kegiatan rutin kader yang urus.” (Kader B) 3) “Posyandu masih numpang di rumah kader, gedungnya belum jadi padahal sudah direncanakan.” (Pemerintah Desa)	Koordinasi administratif ada (rapat), tetapi koordinasi lapangan lemah; fasilitas belum tersedia sehingga kader bekerja dengan keterbatasan.	Mintzberg menekankan pentingnya koordinasi antaraktor dalam organisasi komunitas ¹⁶ . Konsep <i>community-based health care</i> (WHO) menegaskan perlunya dukungan pemerintah lokal agar layanan efektif ¹⁷ .
Motivasi	Kader memiliki motivasi intrinsik; masyarakat lebih tergerak oleh insentif seperti makanan tambahan.	1) “Kami tetap jalankan posyandu meski insentif kecil, karena ini untuk kesehatan anak-anak.” (Kader C) 2) “Saya rajin datang kalau ada makanan tambahan, kalau cuma timbang saja kadang malas.” (Ibu Balita) 3) “Kalau tidak ada dorongan dari kader, masyarakat biasanya lupa datang.” (Ketua KPM)	Kader terdorong oleh tanggung jawab moral (intrinsik), masyarakat masih termotivasi oleh faktor ekstrinsik.	Menurut Herzberg ¹⁸ , kader termotivasi oleh faktor motivator (tanggung jawab). Sementara masyarakat cenderung pada faktor ekstrinsik sesuai dengan Self-Determination Theory ¹⁹

Sosialisasi

Sosialisasi merupakan salah satu aspek fundamental dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya ibu dan anak. Di Desa Malambe, kader posyandu berupaya melakukan sosialisasi melalui berbagai cara sederhana, misalnya pengumuman di masjid, penyebaran informasi dari mulut ke mulut, serta pemanfaatan pertemuan warga. Namun, hasil penelitian

¹⁴ Harsoyo Notoatmodjo dan Maya Dian Rakhmawatie, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum,” *Jurnal Kedokteran Muhammadiyah* 1, no. 2 (2012).

¹⁵ Everett M Rogers dan Arvind Singhal, “Empowerment and communication: Lessons learned from organizing for social change,” *Annals of the International Communication Association* 27, no. 1 (2003): 67–85, <https://doi.org/10.1080/23808985.2003.11679022>.

¹⁶ Henry Mintzberg, *Structure in fives: Designing effective organizations*. (Prentice-Hall, Inc, 1993), <https://psycnet.apa.org/record/1992-98280-000>.

¹⁷ WHO, “Maternal mortality.”

¹⁸ Mintzberg, *Structure in fives: Designing effective organizations*.

¹⁹ Richard M Ryan dan Edward L Deci, “Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being,” *American psychologist* 55, no. 1 (2000): 68.

menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi masih terbatas. Banyak warga masih menganggap posyandu hanya sebatas tempat penimbangan balita, bukan sebagai pusat pelayanan kesehatan terpadu yang mencakup imunisasi, pemantauan gizi, hingga edukasi kesehatan ibu hamil. Hal ini menandakan adanya kesenjangan pemahaman antara tujuan program posyandu dengan persepsi masyarakat.

Dalam perspektif teori *diffusion of innovations Rogers*²⁰, sosialisasi posyandu di Desa Malambe dapat dikategorikan sebagai proses komunikasi inovasi yang masih berada pada tahap awal adopsi. Informasi memang sudah tersampaikan, tetapi belum berhasil menciptakan perubahan perilaku²¹. Proses adopsi inovasi menekankan pentingnya komunikasi yang tidak hanya bersifat informatif tetapi juga persuasif, sehingga masyarakat terdorong memahami manfaat nyata dari layanan posyandu. Kondisi di Desa Malambe menunjukkan bahwa kader posyandu masih berperan sebagai penyampai informasi, bukan sebagai agen perubahan perilaku kesehatan²².

Selain itu, keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang sosialisasi turut memperlemah jangkauan informasi. Sosialisasi yang dilakukan secara manual tanpa dukungan media cetak maupun digital membuat pesan kesehatan kurang menarik dan mudah diabaikan. WHO menekankan bahwa keberhasilan program kesehatan masyarakat di tingkat lokal sangat bergantung pada strategi komunikasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat²³. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi kader posyandu di Desa Malambe berjalan, tetapi belum mampu membangun kesadaran kolektif yang mendalam mengenai pentingnya layanan kesehatan dasar.

Temuan ini memperlihatkan perlunya inovasi dalam metode sosialisasi, misalnya melalui pendekatan berbasis komunitas, edukasi partisipatif, serta pemanfaatan tokoh masyarakat atau pemuka agama sebagai role model²⁴. Jika pola ini dilakukan, maka informasi mengenai posyandu tidak hanya terdengar, tetapi juga dipahami, diyakini, dan dipraktikkan oleh masyarakat.

²⁰ Rogers dan Singhal, "Empowerment and communication: Lessons learned from organizing for social change."

²¹ Ayelet Fishbach dan Kaitlin Woolley, "The structure of intrinsic motivation," *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior* 9, no. 1 (2022): 339–63.

²² Muhammad Rizal Firdaus dan Muhammad Farid Ma'ruf, "PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN MASYARAKAT SEHAT PADA PELAYANAN KESEHATAN DI POSYANDU (GERBANGMAS SIAGA) DI KABUPATEN LUMAJANG (STUDI KASUS PADA GERBANGMAS BOUGENVILLE RW 20 KELURAHAN CITRODIWANGSAN, KABUPATEN LUMAJANG)," *Publika*, 16 Januari 2021, 215–26, <https://doi.org/10.26740/publika.v9n1.p215-226>.

²³ Nadia Aimatun Nisa dkk., "Hubungan Manajemen Pelaksanaan Pemantauan Pertumbuhan Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Posyandu Di Dusun 03 Desa Manislor," *Jurnal Kesehatan Mahardika* 8, no. 2 (2022): 75–79, <https://doi.org/10.54867/jkm.v8i2.78>.

²⁴ Selena Dian, "PERANAN KADER POSYANDU SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN POSYANDU: (Studi Kasus Posyandu Melati 2 Kelurahan Gunungsari Kecamatan Dukuh Pakis Kota

Koordinasi

Koordinasi antara kader posyandu dengan pemerintah desa merupakan kunci untuk mewujudkan efektivitas program kesehatan berbasis masyarakat. Penelitian di Desa Malambe menunjukkan bahwa koordinasi sudah ada melalui rapat evaluasi bulanan, tetapi isinya lebih banyak berupa laporan administratif, bukan forum untuk membahas masalah substantif seperti ketersediaan fasilitas, alokasi dana desa, atau inovasi program kesehatan²⁵. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi masih bersifat prosedural dan belum menyentuh dimensi strategis yang lebih luas.

Fenomena tersebut sesuai dengan pandangan Mintzberg²⁶, yang menyebutkan bahwa koordinasi organisasi sering kali melemah jika hanya dijalankan sebatas formalitas²⁷. Dalam konteks posyandu, lemahnya koordinasi tercermin dari fakta bahwa hingga saat ini kegiatan masih menumpang di rumah kader, bukan di gedung khusus posyandu yang seharusnya difasilitasi pemerintah desa. WHO juga menegaskan bahwa dukungan pemerintah lokal sangat menentukan efektivitas layanan kesehatan berbasis komunitas. Tanpa dukungan struktural dan fasilitas, kader akan kesulitan menjalankan tugas secara maksimal.

Di sisi lain, koordinasi juga dipengaruhi oleh kurangnya transparansi penggunaan dana desa. Beberapa informan menyebutkan bahwa kader sering kali tidak mengetahui secara jelas alokasi dana untuk kegiatan posyandu, sehingga menimbulkan kesan bahwa pemerintah desa kurang terbuka. Hal ini tidak hanya berdampak pada keberlangsungan program, tetapi juga berpengaruh terhadap motivasi kader. Menurut Robbins & Judge²⁸, transparansi organisasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan dan kinerja anggota. Ketika komunikasi tidak terbuka, akan timbul ketidakpuasan dan melemahnya komitmen kader.

Oleh karena itu, koordinasi di Desa Malambe perlu diperkuat dengan mekanisme komunikasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Rapat evaluasi sebaiknya tidak hanya berfokus pada laporan kegiatan, tetapi juga membahas tantangan, solusi, dan inovasi untuk

Surabaya Jawa Timur),” *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (e- ISSN: 2797-0469) 3, no. 06 (2023): 49–57, Indonesia.

²⁵ Katarzyna Lakoma, “Public Governance Paradigms: Competing and Co-Existing **Public Governance Paradigms: Competing and Co-Existing**, by Jacob Torfing, Lotte Bøgh Andersen, Carsten Greve and Kurt Klauði Klausen, Cheltenham, UK, Edward Elgar Publishing, 2020, 240 Pp., £80 (Hardcover), ISBN 978 1 78897 121 8; £25 (eBook), ISBN 978 1 78897 122 5; By Jacob Torfing, Lotte Bøgh Andersen, Carsten Greve and Kurt Klauði Klausen, Cheltenham, UK, Edward Elgar Publishing, 2020, 240 Pp., £80 (Hardcover), ISBN 978 1 78897 121 8; £25 (eBook), ISBN 978 1 78897 122 5,” *Local Government Studies* 46, no. 6 (2020): 1039–41, <https://doi.org/10.1080/03003930.2020.1847904>.

²⁶ Mintzberg, *Structure in fives: Designing effective organizations*.

²⁷ Gregoria A Yudarwati dan Anne Gregory, “Improving government communication and empowering rural communities: Combining public relations and development communication approaches,” *Public Relations Review* 48, no. 3 (2022): 102200, <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2022.102200>.

²⁸ Timothy A Judge dan Stephen P Robbins, *Essentials of organizational behavior*, vol. 3 (Pearson Education (us), 2017).

pengembangan posyandu. Dengan koordinasi yang lebih strategis, posyandu dapat berkembang menjadi pusat kesehatan masyarakat yang lebih berdaya guna.

Motivasi

Motivasi merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan kader posyandu dalam menjalankan peran mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kader posyandu di Desa Malambe tetap bersemangat menjalankan tugas meskipun insentif yang diterima relatif kecil, yaitu Rp300.000 per bulan. Motivasi mereka lebih banyak didorong oleh rasa tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap kesehatan anak-anak dan ibu hamil di desa. Hal ini menunjukkan adanya motivasi intrinsik yang kuat di kalangan kader²⁹. Jika dikaitkan dengan teori dua faktor Herzberg³⁰, motivasi kader posyandu lebih banyak dipengaruhi oleh *motivator factors* seperti tanggung jawab, rasa memiliki, dan makna pekerjaan, bukan oleh *hygiene factors* seperti gaji. Artinya, meskipun insentif yang diberikan kecil, kader tetap menunjukkan komitmen karena mereka merasa pekerjaannya bermakna bagi masyarakat. Namun demikian, dalam jangka panjang, faktor penghargaan eksternal juga tidak boleh diabaikan. Apabila insentif dan dukungan fasilitas tidak ditingkatkan, ada potensi penurunan motivasi kader.

Di sisi masyarakat, motivasi untuk datang ke posyandu masih dipengaruhi oleh faktor ekstrinsik, misalnya pembagian makanan tambahan, vitamin, atau vaksin gratis. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran intrinsik masyarakat tentang pentingnya kesehatan masih rendah. Self-Determination Theory Deci & Ryan³¹ menjelaskan bahwa motivasi yang hanya berbasis insentif eksternal tidak akan bertahan lama. Ketika fasilitas atau bantuan makanan tidak tersedia, partisipasi masyarakat cenderung menurun. Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan motivasi antara kader dan masyarakat.

Dengan demikian, strategi peningkatan motivasi perlu diarahkan pada dua sisi: mempertahankan motivasi intrinsik kader dengan memberikan penghargaan dan penguatan kapasitas, serta membangun motivasi intrinsik masyarakat melalui edukasi dan pemberdayaan. Jika kesadaran masyarakat meningkat, maka partisipasi posyandu akan lebih berkelanjutan dan tidak bergantung pada insentif semata.

²⁹ Fishbach dan Woolley, "The structure of intrinsic motivation."

³⁰ Mintzberg, *Structure in fives: Designing effective organizations*.

³¹ Rogers dan Singhal, "Empowerment and communication: Lessons learned from organizing for social change."

KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dari “Peran Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu Dan Anak Balita Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara” yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Refleksi Teoritis dan Implikasi Praktis, Penelitian ini menunjukkan bahwa peran kader posyandu di Desa Malambe mencakup tiga aspek penting, yaitu sosialisasi, koordinasi, dan motivasi. Dari sisi teoritis, temuan ini memperkuat konsep community-based health services yang menekankan bahwa keberhasilan program kesehatan masyarakat bergantung pada partisipasi aktif kader lokal sebagai agen perubahan. Temuan ini menegaskan bahwa peran kader tidak hanya sebatas teknis (penimbangan balita atau penyuluhan singkat), melainkan juga strategis dalam membangun kesadaran kesehatan di tingkat keluarga. Dari sisi praktis, hasil penelitian menuntut adanya peningkatan kapasitas kader melalui pelatihan yang berkelanjutan, transparansi penggunaan dana desa untuk mendukung fasilitas posyandu, serta penguatan kolaborasi lintas sektor agar posyandu benar-benar berfungsi sebagai pusat layanan kesehatan terpadu.

Kedua, Keterbatasan Studi: Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah informan relatif terbatas (7 orang) sehingga pandangan yang diperoleh belum tentu merepresentasikan seluruh pengalaman masyarakat Desa Malambe. Kedua, pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam berfokus pada kondisi lokal, sehingga hasil penelitian ini lebih bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasikan secara luas. Ketiga, penelitian belum mengeksplorasi secara mendalam perspektif dari pihak Puskesmas sebagai mitra strategis posyandu, yang sebenarnya memiliki pengaruh penting terhadap efektivitas layanan kesehatan di desa.

Ketiga, Agenda Penelitian Lanjutan: Berdasarkan temuan dan keterbatasan di atas, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada tiga hal. Pertama, melakukan studi komparatif antar-desa untuk melihat bagaimana variasi dukungan pemerintah desa memengaruhi kinerja kader posyandu. Kedua, mengintegrasikan perspektif kuantitatif (misalnya survei partisipasi masyarakat) agar dapat melengkapi analisis kualitatif dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Ketiga, mengeksplorasi peran Puskesmas dan pemerintah kabupaten dalam memperkuat kapasitas posyandu, sehingga tercipta model kolaborasi multi-level yang dapat direplikasi di wilayah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Dian, Selena. "PERANAN KADER POSYANDU SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN POSYANDU: (Studi Kasus Posyandu Melati 2 Kelurahan Gunungsari Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur)." *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469)* 3, no. 06 (2023): 49–57. Indonesia.
- Dianto, Icol, Leli Asyuro Nasution, dan Mohd Rafiq. "Netizens' Communication Ethics on Instagram in Islamic Perspective." *Communicator: Journal of Communication* 2, no. 1 (2025): 1. <https://doi.org/10.59373/comm.v2i1.98>.
- Ersila, Wahyu, dan S ST. "Peran kader dalam mengoptimalkan keamanan pangan pada ibu hamil." *Tantangan Dan Problematika Ilmu Kesehatan Masyarakat* 27 (2024).
- Firdaus, Muhammad Rizal, dan Muhammad Farid Ma'ruf. "PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN MASYARAKAT SEHAT PADA PELAYANAN KESEHATAN DI POSYANDU (GERBANGMAS SIAGA) DI KABUPATEN LUMAJANG (STUDI KASUS PADA GERBANGMAS BOUGENVILLE RW 20 KELURAHAN CITRODIWANGSAN, KABUPATEN LUMAJANG)." *Publika*, 16 Januari 2021, 215–26. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n1.p215-226>.
- Fishbach, Ayelet, and Kaitlin Woolley. "The structure of intrinsic motivation." *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior* 9, no. 1 (2022): 339–63.
- Hamdy, M Kholis, Helmi Rustandi, Venita Suhartini, dkk. "Peran kader posyandu dalam menurunkan angka stunting." *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia* 4, no. 2 (2023): 87–96. <https://doi.org/10.15408/jisi.v4i2.37128>.
- Judge, Timothy A., and Stephen P Robbins. *Essentials of organizational behavior*. Vol. 3. Pearson Education (us), 2017.
- Lakoma, Katarzyna. "Public Governance Paradigms: Competing and Co-Existing Public Governance Paradigms: Competing and Co-Existing, by Jacob Torfing, Lotte Bøgh Andersen, Carsten Greve and Kurt Klaudi Klausen, Cheltenham, UK, Edward Elgar Publishing, 2020, 240 Pp., £80 (Hardcover), ISBN 978 1 78897 121 8; £25 (eBook), ISBN 978 1 78897 122 5: By Jacob Torfing, Lotte Bøgh Andersen, Carsten Greve and Kurt Klaudi Klausen, Cheltenham, UK, Edward Elgar Publishing, 2020, 240 Pp., £80 (Hardcover), ISBN 978 1 78897 121 8; £25 (eBook), ISBN 978 1 78897 122 5." *Local Government Studies* 46, no. 6 (2020): 1039–41. <https://doi.org/10.1080/03003930.2020.1847904>.
- "Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia." t.t. Diakses 20 Agustus 2025. https://ppid.kemkes.go.id/toapsoot/2024/10/FINAL_LAKIP-KEMENKES-2023_compressed.pdf.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage, 1994.
- Mintzberg, Henry. *Structure in fives: Designing effective organizations*. Prentice-Hall, Inc., 1993. <https://psycnet.apa.org/record/1992-98280-000>.
- Naeem, Muhammad, Wilson Ozuem, Kerry Howell, and Silvia Ranfagni. "A step-by-step process of thematic analysis to develop a conceptual model in qualitative research." *International journal of qualitative methods* 22 (2023): 16094069231205789. <https://doi.org/10.1177/16094069231205789>.
- Nisa, Nadia Aimatun, Popy Viranti, Donasyhafira Bella Sayekti, dan Indra Surya Permana. "Hubungan Manajemen Pelaksanaan Pemantauan Pertumbuhan Terhadap Partisipasi

- Masyarakat Dalam Kegiatan Posyandu Di Dusun 03 Desa Manislor.” *Jurnal Kesehatan Mahardika* 8, no. 2 (2022): 75–79. <https://doi.org/10.54867/jkm.v8i2.78>.
- Notoatmodjo, Harsoyo, dan Maya Dian Rakhmawatie. “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum.” *Jurnal Kedokteran Muhammadiyah* 1, no. 2 (2012).
- Nugraheni, Nisa, dan Abdul Malik. “Peran kader posyandu dalam mencegah kasus stunting di Kelurahan Ngijo.” *Lifelong Education Journal* 3, no. 1 (2023): 83–92. <https://doi.org/10.59935/lej.v3i1.198>.
- Rogers, Everett M, dan Arvind Singhal. “Empowerment and communication: Lessons learned from organizing for social change.” *Annals of the International Communication Association* 27, no. 1 (2003): 67–85. <https://doi.org/10.1080/23808985.2003.11679022>.
- Ryan, Richard M., and Edward L. Deci. “Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being.” *American psychologist* 55, no. 1 (2000): 68.
- Sintiawati, Nani, Maman Suherman, dan Idah Saridah. “Partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan posyandu.” *Lifelong Education Journal* 1, no. 1 (2021): 91–95. <https://doi.org/10.59935/lej.v1i1.2>.
- Sugiyono, Dr. *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta, 2013.
- WHO. “Maternal mortality.” 2024. https://www-who-int.translate.goog/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.
- Yudarwati, Gregoria A, dan Anne Gregory. “Improving government communication and empowering rural communities: Combining public relations and development communication approaches.” *Public Relations Review* 48, no. 3 (2022): 102200. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2022.102200>.